

BAB I

PENDAHULUAN

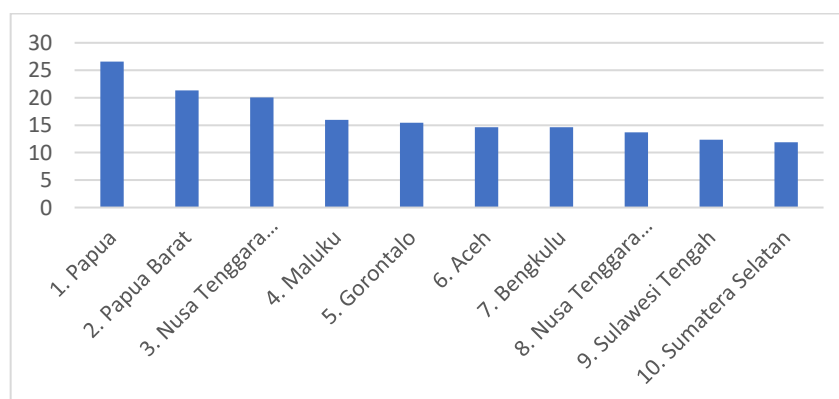
A. Latar Belakang

Pembangunan berarti sebuah tahap dinamis yang bermaksud menaikkan kesejahteraan masyarakat. Barometer keberhasilan pembangunan bisa terlihat dari struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi beserta makin kecilnya kesenjangan pendapatan diantara penduduk, diantara daerah beserta diantara sektor. Maksud utama dari usaha pembangunan selain mewujudkan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, wajib juga mengurangi ataupun menghapus tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran beserta tingkat kesenjangan (Todaro, 2011). Karenanya, prioritas pembangunan yakni penghapusan kemiskinan.

Kemiskinan berarti satu diantara permasalahan sosial yang terdapat di Indonesia. Kemiskinan berarti sebuah kondisi yang mana seseorang tidak sanggup guna pemenuhan keperluan sendiri selaras atas taraf kehidupan lingkungannya hingga orang itu mengalami kesengsaraan pada hidupnya. Variabel kemiskinan sangat bermacam, diantaranya banyaknya masyarakat beserta rendahnya pendidikan. Penelitian ini akan meneliti Pulau Sumatra. Alasan memilih pulau Sumatra karena Pulau Sumatra merupakan pulau di Indonesia dengan propinsi yang mendapati peringkat kemiskinan, terdapat 3 Provinsi di Pulau Sumatra menempati peringkat termiskin di Indonesia. Sumatera adalah pulau keenam terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, dengan luas 443.065,8 km². Penduduk pulau ini sekitar 52.210.926 (sensus,

2010). Pulau ini dikenal pula dengan nama lain yaitu Pulau Percha, Andalas, atau Suwarnadwipa (bahasa Sanskerta, berarti “pulau emas”). Berdasarkan data peringkat kemiskinan di Indonesia, dari 37 provinsi di Indonesia, tiga Propinsi di Sumatra menduduki peringkat kemiskinan di Indonesia. Berikut 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berdasarkan data BPS sampai dengan tahun 2022 yaitu Papua dengan persentase kemiskinan sebesar 26,56 persen, Papua Barat dengan persentase kemiskinan sebesar 21,33 persen, Nusa Tenggara Timur dengan persentase kemiskinan sebesar 20,05 persen, Maluku dengan persentase kemiskinan sebesar 15,97 persen, Gorontalo dengan persentase kemiskinan sebesar 15,42 persen, Aceh dengan persentase kemiskinan sebesar 14,64 persen, Bengkulu dengan persentase kemiskinan sebesar 14,62 persen, Nusa Tenggara Barat dengan persentase kemiskinan sebesar 13,68 persen, Sulawesi Tengah dengan persentase kemiskinan sebesar 12,33 persen dan Sumatera Selatan dengan persentase kemiskinan sebesar 11,90 persen (BPS, 2022).

Berikut grafik persentase peringkat kemiskinan di Indonesia:



Gambar 1. 1. Peringkat Kemiskinan Propinsi di Indonesia

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

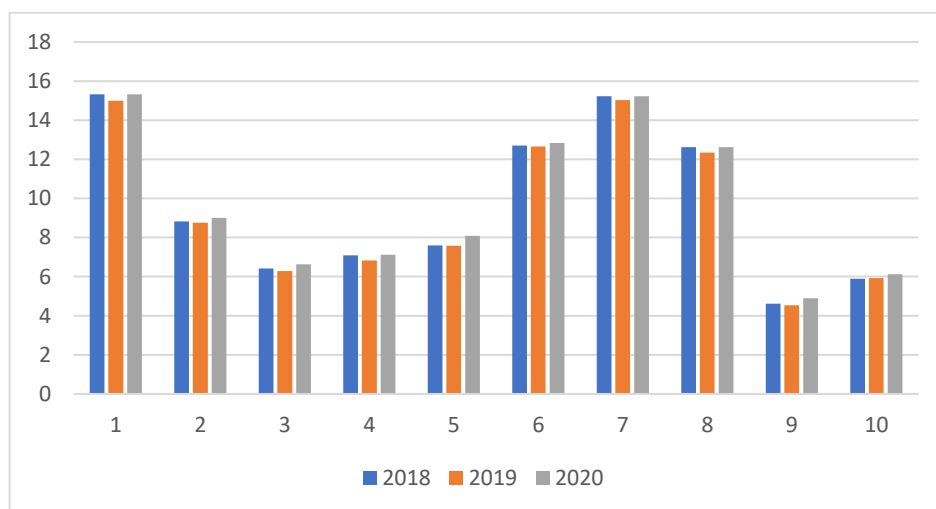
Berdasarkan data di atas bahwa Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ada pada pulau Sumatra sebanyak 3 Provinsi yaitu Aceh, Bengkulu dan Sumatra Selatan. Perkembangan tingkat kemiskinan yang ada di 10 Provinsi di Pulau Sumatra juga mengalami fluktuasi. Berikut tabel persentase Penduduk Miskin di Provinsi di Sumatera (Persen):

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera (Persen)

Propinsi	2017	2018	2019	2020	2021
1. Nanggroe Aceh Darussalam	15,92	15,32	14,99	15,33	15,53
2. Sumatera Utara	9,28	8,83	8,75	9,01	8,49
3. Sumatera Barat	6,75	6,42	6,28	6,63	6,04
4. Riau	7,41	7,08	6,82	7,12	7
5. Jambi	7,9	7,6	7,58	8,09	7,67
6. Sumatera Selatan	13,1	12,71	12,66	12,84	12,79
7. Bengkulu	15,59	15,23	15,03	15,22	14,43
8. Lampung	13,04	12,62	12,34	12,62	11,67
9. Kep. Bangka Belitung	5,3	4,62	4,53	4,9	4,67
10. Kep. Riau	6,13	5,9	5,92	6,12	5,75

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Berikut grafik persentase kemiskinan di Pulau Sumatra:



Gambar 1. 2 Persentase kemiskinan di Pulau Sumatra

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Berdasarkan data penduduk miskin di Sumatera terdapat fluktuasi peningkatan dan penurunan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas yang mendominasi dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah kemiskinan pada Pulau Sumatra sampai dengan tahun 2021.

Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama mempengaruhi kemiskinan adalah upah minimum Provinsi. Meningkatnya UMP tidak juga dapat merendahkan angka kemiskinan, terkait hal tersebut disebabkan adanya peningkatan untuk biaya hidup yang layak (KHL) supaya pemerintah merasa perlu adanya peningkatan guna menjamin kesejahteraan para pekerja didaerahnya. Ningrum (2017) menjabarkan upah berarti sumber pemasukan, bila sumber pemasukan menurun maupun tetap sampai kesejahteraan juga tetap ataupun menurun juga pasti bisa memberi pengaruh tingkat kemiskinan. Upah yang dihasilkan nampaknya dengan riil hasilnya lumayan kecil meskipun secara besaran angka lumayan besar. Penelitian lain dari Ramirez (2015) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Pada penelitian Romi dan Umiyati (2018) memperlihatkan bahwasannya upah minimum memberi pengaruh negatif atas kedudukan terbalik terkait naiknya angka kemiskinan, yang mana upah minimum berarti bagian yang tidak dipisahkan atas kemiskinan. Apabila upah minimum naik, kemudian total keluarga miskin hendak menurun (Marinda et al., 2017). Sedangkan penelitian dari Gung et al. (2019) menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan selanjutnya adalah investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam - penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan - perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa - jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi (Sukirno, 2006). Hasil studi dari Pateda et al. (2019) memperlihatkan variabel investasi memberi pengaruh negatif signifikan atas kemiskinan. Tetapi, dalam studi Kolibu et al. (2019) memperlihatkan hasil investasi memberi pengaruh positif signifikan atas kemiskinan. Pada Wulandari et al. (2021) dengan hasil studi investasi tidak mempengaruhi signifikan dengan kemiskinan.

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan selanjutnya adalah PDRB. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya (Cholili, 2014). Permana (2012) menjelaskan kemiskinan beserta pertumbuhan memiliki keterkaitan yang sangat kuat, dikarenakan tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan condong naik beserta ketika mendekati tahapan akhir pembangunan total orang miskin mengalami pengurangan. Hal itu diberi dukungan sebelumnya dilaksanakan oleh Susanti (2013) yang meneliti terkait PDRB sebagai variabel yang

mempengaruhi kemiskinan. Hasil studi memperlihatkan variabel PDRB mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan. Namun, pada studi Damanik dan Sidauruk (2020) menunjukkan hasil studi PDRB mempengaruhi negatif signifikan atas kemiskinan. Pada penelitian Cholili (2014) memakai hasil studi PDRB tidak memberi pengaruh signifikan atas kemiskinan, hal itu diakibatkan bila peningkatan PDRB yang terjalin tidak senantiasa beriringan oleh menyusutnya total penduduk miskin.

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Tingkat pengangguran yang besar memunculkan rendahnya pemasukan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan (Kristanto, 2014). Usaha pengurangan tingkat pengangguran beserta kemiskinan merupakan sama pentingnya. Bila warga tidak menganggur beserta memiliki pemasukan, pendapatan itu dapat dipakai guna pemenuhan pengeluaran kebutuhan mereka untuk hidup. Apabila kebutuhan hidupnya telah dilaksanakan, kemudian tidak alami miskin beserta diinginkan tingkat pengangguran menjadi kecil, sampai tingkat kemiskinan juga akan terus menurun. Beberapa penelitian pendahulu antaranya, pada studi Istifaiyah (2015) menjabarkan bahwasannya pengangguran terbuka memberi pengaruh positif signifikan atas kemiskinan. Penelitian Hasballah (2021) menunjukkan pengangguran terbuka memberi pengaruh negatif signifikan atas kemiskinan. Namun, pada penelitian Oktaviana et al. (2021) memperlihatkan bahwasannya pengangguran tidak memberi pengaruh signifikan atas kemiskinan.

Penjelasan peneliti mengambil tema penelitian di Pulau Sumatra dikarenakan banyaknya total penduduk di Pulau Sumatra beserta tingginya tingkat kemiskinan di Pulau Sumatra, dan masih menjadi persoalan penting bagi pemerintah tentang tingkat kemiskinan ini. Untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Pulau Sumatra supaya menjadi sebuah kebijakan kemudian yang lebih efisien guna penyelesaian permasalahan tingkat kemiskinan tersebut. Faktor-faktor yang diperkirakan memberi pengaruh tingkat kemiskinan di Pulau Sumatra yakni sebagaimana berikut: (1) upah minimum, (2) investasi, (3) produk domestik regional bruto, (4) pengangguran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Pulau Sumatra Tahun 2017-2021”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upah minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Pulau Sumatra?
2. Bagaimanakah investasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Pulau Sumatra?
3. Bagaimanakah PDRB berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Pulau Sumatra?

4. Bagaimanakah pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Pulau Sumatra?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis upah minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Pulau Sumatra.
2. Mengetahui dan menganalisis investasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Pulau Sumatra.
3. Mengetahui dan menganalisis PDRB berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Pulau Sumatra.
4. Mengetahui dan menganalisis pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Pulau Sumatra.

D. Manfaat Penelitian

Dilandaskan dari tujuan yang sudah di uraikan di atas, manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta menambah wawasan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi dan manfaat bagi pemerintah Provinsi di Pulau Sumatra untuk dapat menanggulangi kemiskinan pada masyarakat, sehingga dapat memberikan tambahan literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.